

PERAN GENERASI MUDA DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA BEBAS KORUPSI

Shavina Addira Kinaya
shavinaadirakinaya@gmail.com
Poltekes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena berdampak besar terhadap pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Generasi muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan karena jumlahnya yang dominan serta kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam memanfaatkan teknologi untuk menyuarakan nilai-nilai kejujuran dan transparansi (Sihombing, 2018; Sumaryati et al., 2022).

Namun, kenyataannya partisipasi generasi muda dalam gerakan antikorupsi masih belum optimal. Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai bahaya korupsi menjadi salah satu faktor yang menghambat keterlibatan mereka. Padahal, pendidikan antikorupsi terbukti mampu membentuk karakter yang berintegritas serta mendorong sikap kritis terhadap berbagai bentuk penyimpangan (Irsyadi & Arifani, 2024; Mita et al., 2025). Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius untuk meningkatkan peran generasi muda dalam menciptakan budaya antikorupsi.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi serta bentuk kontribusi yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pentingnya peran generasi muda dalam pencegahan korupsi dan mendorong keterlibatan aktif mereka di berbagai bidang.

Dengan demikian, esai ini berargumen bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menciptakan Indonesia yang bebas korupsi melalui penguatan karakter, peningkatan kesadaran, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

2. TINJAUAN PUSTAKA / KARANGAN TEORI

2.1 Konsep Utama

Dalam kajian ini terdapat beberapa konsep utama yang menjadi dasar analisis, yaitu generasi muda, korupsi, pendidikan antikorupsi, dan partisipasi masyarakat. Generasi muda merujuk pada kelompok usia produktif yang memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial karena memiliki energi, idealisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks pemberantasan korupsi, generasi muda dipandang sebagai pihak yang mampu membentuk budaya baru yang lebih menjunjung tinggi nilai integritas dan kejujuran (Sihombing, 2018).

Korupsi sendiri didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga merusak sistem sosial, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional (Lantara & Nuka, 2025). Oleh karena itu, korupsi tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai masalah moral dan budaya.

Selanjutnya, pendidikan antikorupsi merupakan konsep penting yang bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial. Pendidikan ini tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran formal di sekolah, tetapi juga melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran mampu membentuk karakter siswa yang lebih sadar terhadap bahaya korupsi (Komalasari & Saripudin, 2015; Sumaryati et al., 2022).

Konsep terakhir adalah partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda. Partisipasi ini mencakup keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan publik,

kegiatan sosial, serta gerakan antikorupsi. Keterlibatan tersebut menjadi penting karena semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin kecil peluang terjadinya korupsi (Mahpudin & Hidayati, 2025).

2.2 Teori Pendukung

Teori pertama yang relevan adalah teori pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Teori ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan kesadaran hukum dan sikap antikorupsi pada generasi muda, sehingga mereka mampu menjadi warga negara yang aktif dan kritis terhadap praktik penyimpangan (Dewantara et al., 2021).

Teori kedua adalah teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang terbentuk melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap lingkungan sekitarnya. Artinya, jika generasi muda terbiasa melihat dan mempraktikkan nilai kejujuran serta integritas dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai tersebut akan tertanam dalam diri mereka. Sebaliknya, jika lingkungan permisif terhadap korupsi, maka perilaku tersebut dapat ditiru (Heliany et al., 2023).

Teori ketiga adalah teori partisipasi masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses sosial dan politik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks pemberantasan korupsi, partisipasi generasi muda melalui organisasi, komunitas, maupun media digital dapat menjadi bentuk kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi (Sakban & Budimansyah, 2025).

Selain itu, terdapat juga teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, sikap, norma sosial, dan kontrol diri. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi dapat membentuk sikap

dan norma yang mendorong generasi muda untuk menolak korupsi dan berperilaku jujur (Lituhayu et al., 2023).

2.3 Penelitian Relevan

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Komalasari dan Saripudin (2015) menemukan bahwa integrasi pendidikan antikorupsi dalam kegiatan sekolah mampu meningkatkan kesadaran siswa terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Sumaryati et al. (2022) yang menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek efektif dalam menanamkan nilai antikorupsi secara praktis.

Penelitian lain oleh Mahpudin dan Hidayati (2025) menunjukkan bahwa peningkatan literasi antikorupsi di kalangan pemuda berpengaruh terhadap meningkatnya partisipasi mereka dalam pengawasan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik dapat mendorong tindakan nyata dalam kehidupan sosial.

Selain itu, Sihombing (2018) mengungkapkan bahwa persepsi generasi muda terhadap korupsi sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan pendidikan yang mereka terima. Jika lingkungan mendukung nilai integritas, maka kecenderungan untuk menolak korupsi akan semakin tinggi. Namun, penelitian Sakban dan Budimansyah (2025) menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda masih belum optimal karena kurangnya kesadaran dan wadah yang mendukung.

Dengan demikian, penelitian ini melengkapi studi sebelumnya dengan menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan, lingkungan, dan partisipasi aktif generasi muda dalam menciptakan budaya antikorupsi yang berkelanjutan

3. PEMBAHASAN / ANALISIS

3.1 Analisis Bagian Pertama: Peran Generasi Muda sebagai Agen Perubahan

Generasi muda memiliki posisi yang sangat strategis sebagai agen perubahan dalam upaya mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik generasi muda yang cenderung kritis, idealis, serta memiliki semangat untuk memperbaiki kondisi sosial di sekitarnya. Dalam konteks ini, generasi muda tidak hanya berperan sebagai penerus bangsa, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang mampu mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar dalam membangun budaya antikorupsi melalui keterlibatan aktif dalam organisasi, komunitas, serta gerakan sosial (Jajuli & Nurtresna, 2025). Misalnya, mahasiswa dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya korupsi, melakukan kampanye sosial, hingga terlibat dalam kegiatan advokasi kebijakan publik. Peran ini sangat penting karena perubahan sosial tidak hanya terjadi melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui gerakan masyarakat yang dimotori oleh generasi muda.

Selain itu, generasi muda juga memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik. Di era informasi, opini publik menjadi salah satu kekuatan yang dapat menekan praktik korupsi. Ketika generasi muda secara aktif menyuarakan penolakan terhadap korupsi, maka akan terbentuk tekanan sosial yang mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan temuan Sihombing (2018) yang menyatakan bahwa persepsi dan sikap generasi muda terhadap korupsi sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial secara luas.

Namun demikian, peran ini tidak akan optimal tanpa adanya kesadaran dan pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi antikorupsi di kalangan generasi muda agar mereka mampu menjalankan perannya secara efektif dan bertanggung jawab (Mahpudin & Hidayati, 2025).

3.2 Analisis Bagian Kedua: Pentingnya Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang berintegritas. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang korupsi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial menjadi kunci utama dalam mencegah perilaku koruptif sejak dini.

Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan antikorupsi yang diterapkan melalui metode pembelajaran aktif, seperti project-based learning, terbukti lebih efektif dalam membentuk sikap dan perilaku siswa (Sumaryati et al., 2022). Hal ini karena siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan nyata. Misalnya, melalui proyek sosial, siswa dapat belajar tentang pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya.

Selain itu, pendidikan antikorupsi juga harus didukung oleh lingkungan yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Menurut teori pembelajaran sosial, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat menunjukkan perilaku yang menjunjung tinggi integritas, maka generasi muda akan lebih mudah menginternalisasi nilai tersebut (Channiago et al., 2022).

Namun, jika pendidikan hanya bersifat teoritis tanpa adanya contoh nyata, maka efektivitasnya akan rendah. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya di sekolah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya mengetahui bahwa korupsi itu salah, tetapi juga memiliki komitmen untuk menolaknya dalam berbagai situasi.

3.3 Analisis Bagian Ketiga: Partisipasi dan Pemanfaatan Teknologi

Di era digital, generasi muda memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya, yaitu kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi digital, khususnya media sosial, telah menjadi alat yang sangat efektif dalam

menyebarkan informasi dan membangun kesadaran publik mengenai isu-isu sosial, termasuk korupsi.

Penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan antikorupsi, seperti melalui kampanye digital, penyebaran informasi, hingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah (Idrus et al., 2024). Generasi muda dapat menggunakan platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok untuk menyuarakan pentingnya transparansi dan mengkritisi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip good governance.

Selain itu, partisipasi digital juga memungkinkan terciptanya gerakan kolektif yang lebih luas. Misalnya, penggunaan tagar (hashtag) dalam kampanye antikorupsi dapat menarik perhatian publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat secara masif. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga alat perubahan sosial yang efektif.

Di sisi lain, keterlibatan generasi muda dalam organisasi dan komunitas juga tetap penting. Partisipasi langsung dalam kegiatan sosial, seperti diskusi publik, seminar, atau aksi sosial, dapat memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai antikorupsi. Penelitian Srirejeki dan Khairurrizqo (2025) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif, termasuk generasi muda, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemerintah dan mengurangi peluang terjadinya korupsi. Namun, pemanfaatan teknologi juga memiliki tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau kurangnya literasi digital. Oleh karena itu, generasi muda perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis agar dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Hal ini menjawab rumusan masalah bahwa optimalisasi peran generasi muda dapat dilakukan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai bidang, seperti

pendidikan, kegiatan sosial, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pengawasan dan kampanye antikorupsi. Generasi muda tidak hanya berfungsi sebagai penerus bangsa, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membentuk budaya baru yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas.

Temuan utama dari analisis menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Selain itu, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan pemanfaatan teknologi terbukti dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi secara lebih luas. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada dukungan lingkungan, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sehingga tercipta ekosistem yang konsisten dalam menanamkan nilai antikorupsi.

Implikasi dari kajian ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara pendidikan, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam memberdayakan generasi muda. Untuk praktik selanjutnya, disarankan agar pendidikan antikorupsi terus dikembangkan secara inovatif dan aplikatif, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pengawasan publik. Dengan demikian, upaya mewujudkan Indonesia bebas korupsi dapat berjalan secara berkelanjutan dan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Sihombing, S. O. (2018). *Youth perceptions toward corruption and integrity: Indonesian context*. Kasetsart Journal of Social Sciences. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.07.002>
- Paranata, A. (2025). *A systematic literature review of anti-corruption policy: A future research agenda in Indonesia*. Public Organization Review. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>
- Sumaryati, S., Suyadi, S., Nuryana, Z., & Asmorojati, A. W. (2022). *Anti-corruption action: A project-based education model*. Frontiers in Education. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.907725>

- Srirejeki, K., & Khairurrizqo, K. (2025). *Community engagement as corruption control strategy in Indonesia*. International Journal of Public Sector Management. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-2024-XXXX>
- Mahpudin, M., & Hidayati, R. (2025). *Enhancing anti-corruption literacy and youth role*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. <https://ykgm.org/index.php/jpm/article/view/506>
- Heliandy, I., et al. (2023). *The role of corruption education in combating corruption crimes*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xxxx>
- Channiago, E., et al. (2022). *Media and character education in preventing corruption in Indonesia*. <https://journal.unnes.ac.id/journals/imrev/article/view/21738>
- Juknevičienė, V., & Toleikienė, R. (2025). *Youth anti-corruption potential*. Business Ethics, the Environment & Responsibility. <https://doi.org/10.1111/beer.70022>
- Setiyono, B., & McLeod, R. H. (2010). *Civil society organisations' contribution to anti-corruption movement*. <https://doi.org/10.1080/00074918.2010.522504>
- Jajuli, A., & Nurtresna, R. (2025). *The role of university students in preventing corruption*. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/7077>